



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 048 /2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR  
188.45/006/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG,  
PENGURUS/PEMEGANG BARANG DAN PENYIMPAN BARANG DAERAH  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3/21/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama Selaku Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, adanya Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Tabalong Nomor B-11/BKPSDM-MPKA/800.1.3.1/02/2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, serta adanya Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Tabalong Nomor B-169/ BKPSDM-MPKA/800.1.3.1/02/2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/006/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang dan Penyimpan Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 24);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/006/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang dan Penyimpan Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomo 188.45/040/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/006/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang dan Penyimpan Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 5, Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 16 pada kolom 3 diubah sehingga Nomor Urut 5, Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 16 pada kolom 3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 1 Februari 2023

 BUPATI TABALONG,

  
KANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
  2. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
  3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  5. Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PENGURUS/PEMEGANG BARANG DAN PENYIMPAN BARANG DAERAH  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN				PENYIMPAN BARANG SKPD	KETERANGAN
		PEJABAT PENGGUNA BARANG	PENGURUS/PEMEGANG BARANG SKPD	5	6		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. TONIE MARWAN, M.Pd NIP. 19660317 199412 1 006 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	MUHAMMAD RAHMADI NIP.19821104 201408 1 001 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2	Dinas Kesehatan	dr. H. TAUFIQURRAHMAN HAMDIE, M.Kes NIP.19700720 200212 1 004 Kepala Dinas Kesehatan	NOVIA ARIANI, A.MK NIP.19861117 201001 2 025 Staf Fungsional Dinas Kesehatan				
3	RSUD H.Badaruddin Kasim	dr. H. MASTUR KURNIAWAN, MM NIP.19720109 200604 1 019 Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim	RAHMADI, A.Md.Ak NIP.19810626 200012 1 001 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SAINI NIP.19730201 199703 1 004 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin			
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT NIP.19680714 199703 1 004 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DZAKY HASNI PUTERA, ST NIP.19960621 202012 1 010 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	ERFIN NIRZA SIREGAR, ST NIP.19710928 200003 1 003 Pjt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	ANDRE ANANDA PUTRA, A.Ma NIP.19990612 202203 1 003 Staf Fungsional Dinas Perhubungan				
6	Dinas Perhubungan	TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT NIP. 19780805 199612 1 002 Kepala Dinas Perhubungan	ERNI YULIANTI, S.AP NIP.19821022 200901 2 002 Staf Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	H. M. NOOR RIFANI, SH, ST, MT NIP.19721220 199803 1 008 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	SELAMET RAMADAN, A.Md.Ak NIP.19820210 201001 1 029 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup				
8	Dinas Lingkungan Hidup	ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si NIP.19700809 199003 1 003 Pjt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	NORAINAH, S.AP NIP.19710219 200701 2 011 Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ir. ROWI RAWATIANICE, M.T NIP.19661125 199403 2 003 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					

1	2	3	4	5	6
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Drs. H. RUSMADI, MM NIP.19671030 199303 1 007 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	AHMAD RIPANI, A.Md.Ak NIP.19820814 200901 1 012 Staf Fungsional Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--	--
11	Dinas Sosial	Drs. H. ABUBAKAR SIDIQ NIP.19670720 199103 1 014 Kepala Dinas Sosial	FADILLAH NIP.19770816 200701 1 017 Staf Fungsional Dinas Sosial	--	--
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	H. SURYANADIE, S.Sos, M.Si NIP.19641215 198602 1 006 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	EKA SARTIKA, S.AP NIP. 19760804 201001 2 012 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	--	--
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	ABDUL HALIM, S.STP NIP.19820420 200112 1 001 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	ERFANSYAH NIP.19790705 200901 1 003 Staf Fungsional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	--	--
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.Si NIP.19780910 199711 1 001 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	WAHYUDI NIP. 19821120 201212 1 001 Staf Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	--	--
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	ABDUL HALIM, S.STP NIP.19820420 200112 1 001 Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	TAUFIK RAHMAN, SE NIP. 19801001 200901 1 009 Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	--	--
16	Sekretariat Daerah	Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST., MT NIP.19670518 199803 2 004 Sekretaris Daerah	SUPARDI, SE NIP.19761111 200312 1 011 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	WILDA AFRİYANI, A.Md.Ak NIP.19800409 200801 2 027 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	--
17	Sekretariat DPRD	Drs. ARBUANSYAH, M.A NIP.19730207 199311 1 003 Sekretaris DPRD	YASIR RAHMAN NIP.19790607 200701 1 011 Staf Fungsional Sekretariat DPRD	--	--
18	Badan Pendapatatan Daerah	Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004 Kepala Badan Pendapatatan Daerah	FAHRURAZI, A.Md.Ak NIP. 19801010 201001 1 025 Staf Fungsional Badan Pendapatatan Daerah	--	--
19	Inspektorat Daerah	Drs. M ZAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev NIP.19730202 199301 1 001 Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	RINI HAYATI, S.Sos NIP. 19780803 201001 2 009 Staf Fungsional pada Inspektorat Daerah	--	--
20	Kecamatan Tanjung	ARIANTO, S.STP NIP.19800104 199810 1 002 Camat Tanjung	RUSMILA, SE NIP.19801021 201212 2 001 Staf Fungsional Kecamatan Tanjung	--	--
21	Kecamatan Murung Pudak	RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP, M.IP NIP.19840301 200312 1 003 Camat Murung Pudak	EKA PUSPITA SARI, A.Md NIP.19880221 200904 2 001 Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak	--	--

1	2	3	4	5	6
34	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ir. H. MOHAMAD MUGENI, MM NIP.19630328 199403 1 004 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	ANNISA JAINA, A.Md NIP. 19910620 202203 2 001 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	--	
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dr. H. ERWAN, SH, M.AP NIP.19660921 198703 1 009 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SUSWATI, SE NIP. 19770826 200906 2 001 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	--	
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. NORHAYATI, SE., M.Si NIP.19690203 199803 2 005 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. HALISAH, S.AP NIP.19810419 200801 2 012 Staf Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	--	
37	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Ir. NORZAIN AKHMAD YANI, M.Si NIP. 19651219 199603 1 001 Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	NOR FAJERIATI, A.Md.Ak NIP.19811128 200801 2 019 Staf Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan	--	
38	Dinas Tenaga Kerja	HERWANDI, S.Pd, M.AP NIP.19640925 198804 1 002 Kepala Dinas Tenaga Kerja	SYAIKHU AKRAMUDDIN, A.Md NIP.19740702 200501 1 003 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	--	
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP. 19680515 199003 1 008 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	ARLIN KARTIKASARI, A.Md NIP.19850112 201903 2 010 Staf Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika	--	
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014 Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	MUHAMMAD SYAFIE NIP. 19720101 200701 1 040 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	--	
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ZAHIRSYAH MANUAR, BA NIP.19650604 198609 1 001 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HENNY YUNIDA, S.AP NIP.19841202 200801 2 007 Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah	--	



BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

